

## **SEKULERISASI EKONOMI PASAR BEBAS**

Salah satu agenda serangan peradaban Kapitalisme AS dan Barat untuk menjadikan ideologi Kapitalisme sebagai agama seluruh manusia termasuk kaum muslimin, adalah slogan Politik Pasar Bebas. Sebagai bentuk sekularisasi di bidang ekonomi, politik pasar bebas melakukan serangan peradaban yang berupa kebebasan hak milik, yang bersumber dari aqidah ideologi Kapitalisme secara intemasional, yakni penerapan kebebasan hak milik dalam perdagangan internasional.

Tujuan dari Politik Pasar Bebas adalah meringankan atau menghentikan intervensi (campur tangan) negara-negara dalam perdagangan khusus, dan dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Bertolak dari sini, AS berusaha menggiring negara-negara di dunia untuk menghilangkan hambatan tarif (bea masuk) dan rintangan apa pun dalam perdagangan intemasional. Termasuk di dalamnya kebijakan proteksi perdagangan secara langsung seperti larangan impor komoditas tertentu untuk memproteksi produk dalam negeri dari persaingan maupun kebijakan proteksi tidak langsung, seperti penetapan tarif yang tinggi untuk sebagian barang impor, pemberian subsidi untuk sebagian produk dalam negeri, dan penetapan kuota untuk mencegah pertukaran perdagangan.

Di awal Januari 1995, dunia menyambut lagi adanya satu organisasi global baru, WTO (World Trade Organization). Organisasi ini akan menggantikan kedudukan GATT dan melengkapi kehadiran World Bank (Bank Dunia), dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang selama ini telah berhasil menguasai tata aturan perekonomian dunia. Berdasarkan hasil survei OECD dan Bank Dunia (Mei 1993) yang meneliti dampak GATT dan bagi perdagangan dunia menyimpulkan, liberalisasi perdagangan dunia akan meningkatkan perdagangan dunia per tahun sebesar US \$ 213 milyar di tahun 2002 (total perdagangan dunia diperkirakan sebesar US \$ 45 trilyun). Ironisnya, masih menurut hasil survei yang berjudul "Trade Liberation : Global Economic Implication" itu, dari US 213 milyar 66 % nya (US \$ 141 milyar) akan diraih negara OECD, negara maju. Bila ditinjau secara perkawasan, maka lima negara yang akan mendapatkan keuntungan yang terbesar adalah Masyarakat Eropa (ME) untung US \$ 80,7 milyar disusul China US \$ 37 milyar, Jepang US \$ 25,9 milyar, AS US \$ 18,8 milyar, dan EFTA US \$ 12,3 milyar. Sementara Indonesia bersama kawasan mediterania dan Afrika diperkirakan akan rugi US \$ 1.9 milyar. Hal ini berarti

perdagangan bebas mempunyai potensi untuk membesarkan kesenjangan antara negara maju dan Negara Dunia ke-3.

Dunia ke tiga (Developping Country/ negara berkembang) berarti tidak bisa dipisahkan dari dunia Islam. Sebagian besar dunia ketiga adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Di daerah sabuk kekeringan Afrika, kawasan yang paling sering menderita kekurangan pangan misalnya, mayoritas adalah negeri-negeri muslim, seperti Nigeria, Volta Hulu, Chad, Mauritania, Guinea Bossall, Somalia, Sudan dan Ethiopia. Sedangkan di Asia ada Banglades, Afganistan, Pakistan dan Indonesia. Sehingga bisa dipastikan keberadaan WTO (dulu GATT) akan sangat mempengaruhi dunia Islam.

Dr. Amin Rais lebih jauh menyoroti kelemahan sistem Kapitalisme ini dengan menyebutkan "Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bersifat internasional, jadi tidak dapat berdiri sendiri dalam suatu negara tertentu. Kapitalisme internasional hanya dapat mempertahankan hidupnya lewat eksploitasi atas dunia ketiga." (Cakrawala Islam, 1989). Dengan demikian Afrika dan sebagian besar negeri Muslim lainnya adalah kawasan yang dipastikan mutlak kalah. Negeri-negeri Islam tersebut merupakan negara yang paling banyak dirugikan, mengingat rendahnya daya saing mereka di pasaran internasional dan kemiskinan yang membelenggunya. Mengutip keterangan dari majalah kesehatan dunia (Juni, 1982), Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil menyebutkan : "Dari 36 negara termiskin yang paling terbelakang di dunia, ada 25 negara di Afrika, 8 di Asia, 2 di Pasifik dan 1 di Amerika. Adapun kebanyakan penduduknya adalah kaum muslimin. 4 diantaranya menjadi anggota Liga Arab" (Kemiskinan dan Keterbelakangan Negeri-negeri muslim : 41). Tidak banyak yang tahu tonggak sejarah rekolonialisasi global sedang dibangun dan akan melengkapi aturan-aturan yang mengikat dunia ketiga. Tidak puas menjadi Global Corp di bidang politik. AS dan sekutu-sekutunya mulai merintis menjadi Polisi Ekonomi Dunia.

Dengan ketergantungan di bidang ekonomi yang demikian besar, negara Barat dapat memaksakan kemauan politiknya atas suatu negara. Negara-negara tersebut, termasuk negeri-negeri Islam menjadi tidak merdeka secara politik. Tujuan AS memaksakan politik pasar bebas atas negara-negara di dunia, adalah mengubah keadaan dunia menjadi "Pasar Bebas", membuka pasar negara-negara di dunia bagi penanaman modal asing, dan mengeliminir peran negara-negara di dunia untuk mengatur perekonomian, dengan melakukan privatisasi sektor publik. Tujuan akhir ini khususnya diarahkan kepada negara-negara dengan

sektor publik yang menempati proporsi tinggi dalam kegiatan perekonomian mereka. Artinya, keberadaan sektor publik ini telah dianggap menghalangi kemunculan peran dan pertumbuhan pemilikan individu.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, AS dan negara-negara Kapitalis besar telah mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional dan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti NAFTA (beranggotakan AS, Kanada dan Meksiko), Pasar Bersama Eropa, dan APEC, yang beranggotakan negara-negara NAFTA, Australia, Selandia Baru, Jepang, Indonesia, dan negara-negara macan Asia, yang semuanya berada di sekitar Lautan Pasifik. Selain itu, AS juga telah menjadikan ketujuh negara industri kaya (negara G-7) sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional, serta untuk menjamin dan mengontrol pelaksanaan semua kebijakan itu. Ini semua merupakan langkah persiapan yang ditempuh AS untuk melegitimasi perjanjian tersebut menjadi undang-undang internasional khususnya yang berkaitan dengan kebijakan di sector perdagangan. AS juga memanfaatkan WTO (World Trade Organization) untuk mewujudkan tujuannya. Sebelum WTO berdiri, GATT (General Agreement on Tariff and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan, tetap menjadi rujukan bagi perdagangan internasional. Hampir semua negara di dunia terikat dengan GATT, baik negara-negara yang menandatangani maupun yang tidak. Namun karena GATT hanya mengatur hubungan perdagangan antar-negara, dan tidak memberi otoritas kepada negara untuk mengatur kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri yang diambil oleh negara-negara di dunia, AS pun merasa bahwa GATT tidak memadai lagi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Maka, AS kemudian mengambil langkah baru untuk menggantinya dengan WTO, yang kelahirannya telah diumumkan di Maroko.

Tak lama kemudian, mayoritas negara di dunia pun ramai-ramai menandatangani perjanjian baru tersebut dan bergabung dengan organisasi baru itu. Tentu, ini adalah hasil berbagai tekanan yang dilancarkan oleh AS terhadap Negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuannya. Aspek terpenting dari perjanjian baru itu, ialah adanya

otoritas baru kepada negara-negara Kapitalis kaya *dan* berpengaruh dengan AS sebagai gembongnya untuk mengintegrasikan urusan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara dunia ke-3 tertekan dengan perjanjian itu secara umum, melalui peraturan yang dirancang oleh

negara-negara berpengaruh tadi. Maka bukan rahasia lagi, bahwa tujuan utama AS dan negara-negara Kapitalis dalam strategi pasar global ini adalah membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk-produk unggulan dan investasi-investasi mereka. Dengan begitu, negara-negara yang disebut sebagai negara-negara berkembang itu akan senantiasa berada di bawah hegemoni AS dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta tidak berpeluang memhangun ekonominya sendiri di atas basis-basis yang kuat dan kokoh.

Padahal kondisi demikian ini, akan bisa membebaskan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang tadi dari negara-negara kaya, sehingga nantinya negara-negara berkembang itu tidak lagi menjadi pasar bagi barang-barang konsumtif yang diproduksi negara-negara kaya. Jadi, apabila negara-negara berkembang itu tetap berada di bawah hegemoni negara-negara kaya, maka mereka tak akan pernah mampu mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi produktif, yang harus bertumpu pada industri berat sebagai prasyarat mutlak bagi kondisi perekonomian yang produktif itu.

Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, kaum muslimin tidak boleh menerima Politik Pasar Bebas yang dipropagandakan dengan gencar dan luas oleh AS dan negara-negara Barat. Sebab, strategi tersebut merupakan penerapan kebebasan hak milik yang diserukan oleh sistem Kapitalisme. Dan jelas ini bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Selain itu, keterikatan negeri-negeri Islam dengan Politik Pasar Bebas akan memberikan kesempatan luas kepada kaum kafir untuk menguasai perekonomian negeri-negeri Islam.

Terlebih lagi, Politik Pasar Bebas juga akan menghalang-halangi negeri-negeri Islam untuk membebaskan diri dari belenggu kekufuran dan orang-orang kafir. Jelas ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT : "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.*" (Q.S. An-Nisaa' : 141)

Benar, Islam memang mengharamkan ditentukannya bea cukai atas perdagangan, berdasarkan sabda Rasul saw: "*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil cukai (bea impor dari kaum muslimin dan rakyat Daulah Khilafah).*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim)

Demikian juga, Islam memang tidak membolehkan penetapan bea cukai yang dikenakan atas seluruh pedagang yang menjadi rakyat Daulah Khilafah. Asal komoditas tak diperhatikan lagi di sini, sebab

dalam strategi perdagangannya Islam tidak mempertimbangkan asal barang, tetapi kewarganegaraan pedagang.

Dan memang benar pula, bahwa bea cukai tidak boleh dikenakan terhadap para pedagang dengan kewarganegaraan manapun, kecuali sekedar menjalankan perlakuan yang sama dari negara asing terhadap pedagang warga negara Daulah Khilafah. Akan tetapi, semua ini sama sekali tidak berarti bahwa politik pasar bebas itu sesuai dengan Islam, yang berarti tidak ada larangan untuk terikat dengannya. Sebab, kalaulah sebagian hukum-hukum Islam itu mirip dengan hukum-hukum pada sistem lain dalam beberapa segi, hal itu tidak berarti kaum muslimin boleh mengambil hukum-hukum non Islam. Jadi, kaum muslimin tetap tidak boleh mengambil hukum-hukum non Islam dengan alasan mengandung kemiripan dengan hukum-hukum Islam. Begitu pula sebaliknya, kaum muslimin tidak boleh memberikan sifat-sifat kekufuran kepada sistem Islam hanya karena adanya kemiripan antara Islam dengan aspek-aspek tertentu dalam ideologi-ideologi lain. Perbuatan keliru seperti itu pernah dilakukan oleh sementara orang. Penyair Ahmad Syauqi, misalnya, pernah menyifati Islam sebagai sistem yang sosialis. Dalam sebuah syairnya yang dia tujuikan untuk Rasulullah saw, dia , berkata: "*Engkau, wahai Rasulullah, adalah pemimpin orang-orang Sosialis.*" Kesalahan serupa juga diperbuat oleh sebagian kaum muslimin, yang telah menyifati *syura* yang memang diserukan oleh Islam sebagai prinsip Demokrasi. Tindakan seperti itu sangat keliru, sebab setiap ajaran yang ada dalam Islam tiada lain adalah Islam semata. Bukan Sosialisme, bukan Demokrasi, atau apa pun lainnya. Lagi pula, Islam itu sendiri sudah lebih dulu ada di muka bumi ini sebelum lahinya Sosialisme dan Demokrasi-Kapitalis.

Atas dasar ini, kaum muslimin wajib menolak Politik Pasar Bebas karena strategi ini bertentangan dengan Islam, baik ditinjau dari segi pandangan dasar yang melahirkannya dan asas-asas pijakannya, maupun dari segi berbagai kemudharatan yang akan terjadi akibat adanya keterikatan kaum muslimin dengan strategi itu.

Tindakan mengikatkan perekonomian negeri-negeri muslim dengan perekonomian negara-negara Kapitalis yang melaju dengan amat cepat, adalah tindakan gegabah yang sangat berbahaya. Sebab, hal ini akan menghalangi pembangunan ekonomi Dunia Islam di atas basis-basis yang kokoh, dan di samping itu akan memberikan kesempatan luas kepada kaum kafir untuk mempertahankan cengkeramannya atas kaum muslimin dan negeri-negeri mereka. Wallohu a'lam bisshowab.

